

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia terus bertumbuh, salah satunya berkat pertumbuhan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang merupakan fundamental perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya data dari DEPKOP (2015-2016), bahwa 53,3% PDB Indonesia tahun 2015-2016 berasal dari UMKM. Pada tahun yang sama, UMKM juga tercatat berjumlah 57,9 juta unit usaha atau setara dengan 99,98% dari total keseluruhan unit usaha di Indonesia. Data ini nampak pada Tabel 1.1. UMKM menurut UU Nomor 20 tahun 2008 didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu yang tergolong UMKM adalah usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan atau memiliki omzet maksimal Rp 50 miliar per tahun.

Tabel 1.1. Data Pertumbuhan UMKM di Indonesia Tahun 2011-2016

Indikator (satuan)	2011	2012	2013	2014	2015-2016
Jumlah UMKM (unit)	53.823.732,00	55.206.444,00	56.534.592,00	57.895.721,00	58.687.382,00
Jumlah karyawan UMKM (orang)	65.601.591,00	74.687.428,00	90.491.930,00	114.144.082,00	118.257.302,00
Nilai export UMKM (Rp miliar)	363.200,44	791.597,40	1.099.301,10	1.536.918,80	1.587.625,60
Sumbangan PDB UMKM (Rp miliar)	39.277,07	80.846,52	140.363,84	182.112,70	190.248,56

Sumber : Depkop, 2015-2016.

Pengembangan UMKM dan PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM & PKL memegang peran penting dalam meningkatkan kontribusi positif terhadap jumlah kewirausahaan, kesempatan kerja, dan sumber

pendapatan masyarakat; selain itu, UMKM juga berperan sebagai solusi dalam permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia, seperti : jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, pembangunan tidak merata, kesenjangan perekonomian, dan lain sebagainya (Agustina, 2015:6).

PKL sendiri merupakan bagian dari UMKM. PKL didefinisikan oleh APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) sebagai : “setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha ekonomi mikro, yang menjalankan usahanya di pinggir jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat keramaian lainnya”. APKLI juga mendefinisikan Usaha PKL sebagai : “setiap tindakan, perbuatan dan atau kegiatan di bidang usaha dan perekonomian yang di lakukan oleh pelaku ekonomi mikro dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba sesuai dengan azas yang berlaku” (ADRT-APKLI, 2015). Lebih dari 65% dari keseluruhan total PKL di Indonesia merupakan Pedagang Makanan & minumam Kaki Lima (PMKL) (data Internal APKLI DPW Jatim, 2015). APKLI DPW Jatim sendiri Mengklasifikasikan PMKL kedalam 6 golongan, yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Klasifikasi PMKL Jawa Timur versi APKLI DPW Jatim.

No	Klasifikasi PMKL	Produk utama	Jumlah penjualan rata-rata /hari (porsi /bungkus/ unit)	Lama berusaha (tahun)	Populasitas	Pelanggan tetap
1	Gol F	produk dari usaha lain/ distributor/ pabrikan/titipan	0 - 50	1 bulan - > 6 bulan	-	> 5
2	Gol E	produk dari usaha lain/ distributor/ pabrikan dan campuran sedikit produk buatannya sendiri	51 - >100	6 bulan - >1 th	-	> 15
3	Gol D	produk buatannya sendiri dan sedikit tambahan produk buatan produk pabrikan	101 - >250	1 th - > 2 th	-	> 25
4	Gol C	buatannya sendiri dan sedikit tambahan produk buatan produk pabrikan	251 - >450	1 th - > 3 th	c	> 50
5	Gol B	produk buatannya sendiri dan sedikit tambahan produk buatan produk pabrikan	451 - >700	2 th - > 5 th	b	> 125
6	Gol A	produk buatannya sendiri dan sedikit tambahan produk buatan produk pabrikan	451 - >700	3 - >6 th	a	> 200

Sumber : Data internal sekretariat DPW APKLI Jatim, 2015

Pada tahun 2015, Surabaya memiliki lebih dari 59.000 PKL, dimana lebih dari 39.000 merupakan PMKL. Diantara lebih dari 39.000 unit PMKL usaha tersebut, Surabaya hanya memiliki 1.053 PMKL yang bergolongan A. Dari 1.053 PMKL golongan A yang berada di Surabaya, terdapat hanya ada 158 PMKL yang membuka cabang, ini setara dengan hanya 6.74% PMKL yang sadar atas manfaat membuka cabang. Di Kecamatan Gubeng hanya ada 48 PMKL golongan A, dimana jumlah ini merupakan jumlah golongan A terbanyak di seluruh kecamatan di Surabaya (APKLI DPW JATIM, 2015). Ini menggambarkan bahwa banyak peluang dalam pengembangan PMKL golongan A di Surabaya, khususnya pada Kecamatan Gubeng (dapat dilihat pada Tabel 1.3.).

Tabel 1.3. Sebaran Jumlah PMKL Gol A di Surabaya.

No	Kecamatan	PMKL GOL A	PMKL GOL A buka cabang
1	Asemrowo	27	2
2	Benowo	34	4
3	Bubutan	33	2
4	Bulak	34	3
5	Dukuh Pakis	39	9
6	Gayungan	33	3
7	Genteng	31	2
8	Gubeng	42	11
9	Gununganyar	34	6
10	Jambangan	32	3
11	Karangpilang	31	3
12	Kenjeran	36	6
13	Krempangan	33	5
14	Lakar Santri	37	8
15	Mulyorejo	36	6
16	Pabean Cantikan	26	1
17	Pakal	32	3
18	Rungkut	40	7
19	Sambikerep	38	5
20	Sawahan	35	4
21	Semampir	30	4
22	Simokerto	32	6
23	Sukolilo	38	8
24	Sukomanunggal	39	9
25	Tambaksari	32	6
26	Tandes	35	4
27	Tegalsari	33	3
28	Tenggiling Mejoyo	32	8
29	Wiyung	28	5
30	Wonocolo	33	5
31	Wonokromo	38	7
Total (unit usaha)		1.053	158

Sumber : Data Internal APKLI DPW JATIM (2015).

PKL di Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam pengembangan usahanya. Beberapa masalah dasar PKL dalam pengembangan usahanya yaitu : pemasaran, permodalan, pengembangan usaha dan daya saing usaha, dan lokasi usaha (Kuncoro, 2009:45). Apabila PKL dibiarkan tidak berkembang, maka akan terjadi penumpukan jumlah PKL di Indonesia dengan berbagai permasalahannya. Semakin banyak jumlah PKL dengan Keterbatasan permodalan dan pengetahuan, skill, dan manajemen akan lebih membahayakan. Bahkan yang dikhawatirkan dari pertumbuhan jumlah PKL liar dan legal tanpa pengaturan yang baik dapat menimbulkan persoalan yang buruk, seperti berubahnya fungsi fasilitas umum, mengganggu perencanaan tata kota, penurunan kualitas produksi, persaingan usaha tidak sehat. Bila PKL dieliminasi, akan menimbulkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang tinggi (Kuncoro, 2009:55).

Ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima adalah : Kumuh, Kemacetan Lalu Lintas, dan berubahnya fungsi trotoar (Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2002:64). Hal inilah yang menjadikan dasar bagi APKLI untuk berupaya mencari solusi untuk PKL yang ada di Indonesia, dan mengembangkan usaha PMKL terbaik di Indonesia. PMKL yang ditata dengan baik dapat berkontribusi di bidang pariwisata, sebagai wisata kuliner. Hal senada juga disampaikan oleh Alma (2011:158) bahwa kuliner merupakan hal yang penting bagi berbagai jenis pariwisata, karena semua orang pasti perlu makanan. Selain itu, PKL apabila dikembangkan dapat berfungsi sangat besar, antara lain : PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan; PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik; PKL menyimpan potensi pariwisata; Dan, PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didesain dengan baik.

APKLI Sejak awal tahun 2016 mulai memprakarsai program kemitraan “APKLI BEST” dalam memperdayakan dan membantu mengembangkan usaha dari PKL dan UMKM di Jawa timur, khususnya untuk pelaku usaha UMKM dan PKL yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan sistem kemitraan cabang maupun franchise, dengan manajemen akan dikelola oleh APKLI. Keuntungan dan manfaat kemitraan APKLI BEST dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.4. Manfaat, keuntungan, keunggulan, dan cara kerja kemitraan APKLI BEST bagi PMKL.

Keunggulan	keuntungan	Manfaat	Cara kerja
penambahan biaya permodalan tanpa jaminan; manajemen profesional, akuntabilitas, dan transparan; pengembangan usaha yang lebih cepat; pemasaran dan promosi yang lebih baik; penataan operasional yang lebih “BEST”; dan kemandirian dagang yang kuat.	menikmati peningkatan pendapatan dan perbaikan manajemen operasional usaha yang lebih baik dan cepat, serta tidak perlu lagi bingung dengan persoalan pendanaan dengan pinjaman bunga tinggi dan persyaratan yang rumit.	APKLI BEST ini diharapkan dapat membantu PKL dalam keberlangsungan usahanya, seperti : memberi kepastian lokasi berusaha, membantu melakukan penataan PKL untuk tempat usaha yang lebih layak, menghindarkan PKL dari risiko relokasi dari pemerintah kota, membantu dalam masalah permodalan, pembinaan, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas oprasional, produksi, pemasaran, manajemen, dan perbaikan pecatatan pembukuan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. daftar 2. survey 3. kajian 4. bis-plan dari APKLI dan rencana penataan usaha dan penentuan tempat usaha 5. kontrak kerja sama 6. permodalan 7. manajemen dan oprasional (termasuk pelatihan, pembinaan, dan transfer knowledge&/atau kerahasiaan usaha) 8. evaluasi & bagi hasil 9. pengembangan dan perbaikan berkelanjutan

Sumber : Lembar rencana kerja 2015-2020 Dewan Pembina APKLI DPW Jatim

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan Sendiri dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama. Pengendalian kegiatan kemitraan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra (Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 1998, dalam Damayanti, 2014:18). Menurut Agustina (2015:43) pola

kemitraan UMKM terdapat beberapa macam, yaitu : permodalan, bagi hasil / sewa - lahan, tempat, perusahaan angkat, waralaba, cabang, rantai pasokan, hulu-hilir, membeli usaha lain, mengembangkan usaha, dan organisasi kewirausahaan.

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Studi Kasus faktor penghambat konsep kemitraan APKLI BEST Bagi PMKL golongan A di wilayah Kecamatan Gubeng, Surabaya”. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengenali apa saja faktor penghambat pelaksanaan terhadap penawaran kemitraan APKLI BEST yang dicanangkan oleh APKLI DPW Jatim, sehingga diharapkan APKLI dapat membuat kebijakan program kemitraan yang lebih mudah untuk diterima oleh pelaku PMKL dalam upaya pengembangan usaha UMKM di Indonesia, serta dapat membuat program dalam pembentukan persepsi PMKL untuk meningkatkan kesadaran akan penting dan bermanfaatnya program kemitraan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijabarkan, maka ditemukan rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu “Faktor apa sajakah yang menghambat konsep kemitraan APKLI BEST Bagi PMKL golongan A di wilayah Kecamatan Gubeng?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat konsep kemitraan APKLI BEST Bagi PMKL golongan A di wilayah Kecamatan Gubeng.”

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dan referensi mengenai pola pikir dan tanggapan, serta perilaku pelaku PMKL dan UMKM khususnya pada menanggapi penawaran untuk melakukan kemitraan antara APKLI BEST dengan PMKL & UMKM.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi organisasi APKLI untuk menambah wawasan, pengetahuan, informasi, dan bahan untuk rancangan program dan strategi kemitraan yang lebih baik dan yang lebih mudah diterima oleh pelaku UMKM dalam upaya organisasi membantu mengembangkan UMKM di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Serta agar organisasi dapat merancang strategi untuk menyadarkan pelaku UMKM akan pentingnya dan bermanfaatnya kemitraan dan membuka cabang.

1.5. Batasan Lingkup Permasalahan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini terletak pada data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer internal organisasi APKLI periode Januari 2015 hingga Januari 2017; Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Gubeng, Surabaya; Sumber informan yang dipilih pada penelitian ini adalah PMKL golongan A di Kecamatan Gubeng. Penelitian ini ditujukan lebih kepada PMKL bergolongan A, karena dianggap memiliki potensi pasar dan usaha yang paling baik untuk dikembangkan. Sedangkan wilayah lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini memilih lokasi kecamatan Gubeng, karena diwilayah Gubeng merupakan wilayah dengan jumlah PMKL golongan A terbanyak di Surabaya.